

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi (Sukirno,2006:423) biasanya ditandai dengan peningkatan produksi barang dan jasa. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan pokok untuk mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin untuk menghindari adanya ketimpangan pendapatan sehingga dapat tercapai suatu kesejahteraan. Indikator adanya pembangunan ekonomi dari segi materi dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pembangunan ekonomi suatu negara dapat dikatakan meningkat dengan melihat pertumbuhan ekonominya. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat pada setiap tahunnya, maka dapat dikatakan pembangunan ekonomi pun meningkat.

Pembangunan pada dasarnya mengarah kepada dua hal yaitu peningkatan pendapatan perkapita dan terjadinya perubahan struktur ekonomi. Secara umum perubahan struktur ekonomi bisa terjadi dengan adanya perubahan peran atau kontribusi tiap-tiap sektor. Peningkatan persentase sumbangan dari suatu sektor terhadap total produk atau pendapatan nasional menunjukkan bahwa sektor tersebut semakin berperan dalam mendorong perekonomian. Tidak adanya

perubahan peran dari masing-masing sektor terhadap total pendapatan nasional menunjukkan pembangunan yang terjadi tidak mengubah struktur ekonomi (Hudiyanto, 2013).

Permasalahan mengenai pembangunan ekonomi suatu negara menjadi salah satu fokus penting dalam melaksanakan pemerintahan yang ada karena ini menyangkut mengenai kestabilan negara yang mencangkup kehidupan individu disetiap wilayah. Pembangunan ekonomi tidak hanya merupakan program dari pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah.

Era otonomi daerah ditandai dengan munculnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa daerah mempunyai wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakatnya.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan memaksimalkan pengolahan sumber daya sehingga dapat diketahui apa sektor ekonomi unggulan disuatu daerah untuk dijadikan prioritas pembangunan ekonomi. Jika dilihat dari potensi yang ada, dalam setiap daerah walaupun dalam satu provinsi bisa saja mengalami perbedaan sektor ekonomi unggulan yang disebabkan karena infrastruktur dan letak geografis selain itu juga karena sumber daya lokal dalam hal ini termasuk tenaga kerja dan bahan baku yang tersedia disetiap wilayah berbeda-beda. Dengan adanya permasalahan tersebut maka diperlukan adanya penelitian yang mendalam ditiap daerah untuk mendapatkan

data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan (Arsyad, 1999 dalam Agus, 2009).

Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lambat biasanya belum optimal dalam pengembangan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian sehingga proses pembangunan ekonomi pun terhambat padahal untuk mencapai perubahan perekonomian yang lebih baik, masing-masing daerah harus tahu potensi sumber daya yang dimilikinya dan mampu mengoptimalkan sumber daya tersebut.

Selain itu perlu adanya kerjasama antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga dapat secara maksimal sehingga dapat tercapai tujuan dari pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pendapatannya, karena jika pendapatan tinggi maka masyarakat berarti telah memiliki pekerjaan dan tingkat konsumsi pun tinggi sehingga dapat dikatakan sejahtera. Pendapatan daerah dapat dilihat melalui produk domestik bruto yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah yang biasanya dipublikasi di badan pusat statistik masing-masing wilayah di daerah.

Produk Domestik Regional Bruto dapat menggambarkan bagaimana suatu daerah dalam mengelola sumber daya biasanya dilihat dari PDRB menurut jenis lapangan usaha di masing-masing wilayah. Perbedaan potensi ekonomi unggulan yang dimiliki setiap wilayah pula yang menyebabkan adanya perbedaan nilai PDRB untuk masing-masing wilayah. PDRB ada 2 yaitu atas harga berlaku dan

atas harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan atau PDRB rill bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Biasanya pembangunan ekonomi suatu daerah dilihat berdasarkan PDRB atas harga konstan agar dapat melihat pertambahan dari kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai rill, artinya dinyatakan dalam harga konstan.

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup lambat dibandingkan dengan kabupaten lain yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 1.011,90 km² dengan jumlah penduduk 1.284.236 jiwa dan kepadatan penduduk 1.269 populasi per km² pada tahun 2014.

TABEL 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011 - 2013 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota		Tahun 2011	Tahun 2012 ^{*)}	Tahun 2013 ^{**)}
01.	Kab. Cilacap	13.749.105,22	14.517.885,27	15.352.290,57
02.	Kab. Banyumas	4.931.433,05	5.221.519,49	5.571.940,87
03.	Kab. Purbalingga	2.678.085,09	2.845.663,33	3.006.626,67
04.	Kab. Banjarnegara	3.030.542,04	3.189.651,65	3.357.960,15
05.	Kab. Kebumen	3.070.381,16	3.242.111,77	3.378.160,30
06.	Kab. Purworejo	3.168.113,40	3.327.672,40	3.493.600,85
07.	Kab. Wonosobo	1.974.114,16	2.075.562,03	2.179.015,39
08.	Kab. Magelang	4.292.354,46	4.542.888,65	4.797.319,01
09.	Kab. Boyolali	4.472.217,00	4.725.558,65	4.982.065,57
10.	Kab. Klaten	4.938.050,65	5.211.757,15	5.513.307,86
11.	Kab. Sukoharjo	5.206.687,70	5.468.708,95	5.742.876,93
12.	Kab. Wonogiri	3.140.855,16	3.325.089,57	3.470.048,41
13.	Kab. Karanganyar	5.752.136,99	6.086.877,13	6.414.504,10

14.	Kab. Sragen	3.270.052,52	3.485.992,03	3.717.488,14
15.	Kab. Grobogan	3.370.343,70	3.578.062,78	3.742.249,81
16.	Kab. Blora	2.170.194,81	2.278.804,85	2.390.800,07
17.	Kab. Rembang	2.384.459,23	2.500.796,46	2.626.475,93
18.	Kab. Pati	4.828.723,12	5.114.682,32	5.407.167,36
19.	Kab. Kudus	13.184.051,12	13.754.585,17	14.398.651,02
20.	Kab. Jepara	4.502.689,29	4.763.305,81	5.038.103,63
21.	Kab. Demak	3.156.126,24	3.302.610,17	3.455.273,15
22.	Kab. Semarang	5.869.949,71	6.223.188,31	6.573.208,40
23.	Kab. Temanggung	2.521.439,02	2.648.488,46	2.781.320,87
24.	Kab. Kendal	5.717.086,83	6.033.632,04	6.350.000,08
25.	Kab. Batang	2.486.765,61	2.611.528,72	2.746.480,23
26.	Kab. Pekalongan	3.384.387,72	3.564.599,07	3.758.993,95
27.	Kab. Pemalang	3.622.635,53	3.813.839,22	4.020.038,98
28.	Kab. Tegal	3.801.779,47	4.001.204,96	4.233.513,40
29.	Kab. Brebes	5.780.877,86	6.082.267,39	6.390.184,05
30.	Kota Magelang	1.169.342,74	1.245.158,09	1.318.707,97
31.	Kota Surakarta	5.411.912,32	5.742.861,31	6.080.954,07
32.	Kota Salatiga	961.024,62	1.018.104,45	1.080.656,98
33.	Kota Semarang	22.736.136,19	24.196.487,78	25.697.338,39
34.	Kota Pekalongan	2.200.827,78	2.324.147,40	2.460.946,93
35.	Kota Tegal	1.340.227,74	1.408.144,10	1.477.505,82
Nilai rata-rata total PDRB provinsi jawa tengah				5.228.736,455

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa PDRB kabupaten pemalang termasuk terendah dibandingkan dengan 34 kota/ kabupaten yang berada di Provinsi Jawa tengah. Angka tersebut membuktikan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang relatif rendah dibandingkan dengan 33 kota/kabupaten di Provinsi Jawa tengah, PDRB kabupaten pemalang pada tahun mengalami peningkatan PDRB dari tahun ke tahun pada tahun 2011 sebesar 3.622.635,53 juta rupiah, pada tahun 2012 meningkat sebesar 3.813.839,22 juta rupiah dan pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan sebesar 4.020.038,98 juta rupiah sedangkan nilai rata-rata PDRB di Provinsi Jawa tengah sebesar 5.228.736,455 juta rupiah. Dengan begitu menunjukkan bahwa tingkat

PDRB Kabupaten Pemalang masih rendah dibandingkan dengan tingkat PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa tahun terakhir Provinsi Jawa Tengah juga mengalami fluktuasi dalam laju pertumbuhan ekonominya, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

TABEL 1.2
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK Tahun
2010 Provinsi Jawa Tengah 2010-2014 (dalam persen)

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,60	3,83	3,04	2,55	-2,95
2	Pertambangan dan Penggalian	17,71	-2,19	5,30	6,17	6,50
3	Industri Pengolahan	4,57	5,19	6,72	5,38	8,04
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,01	7,33	9,97	8,46	2,70
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,37	2,27	-1,39	0,23	3,45
6	Konstruksi	7,42	2,23	6,33	4,90	4,38
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,72	8,23	1,85	4,65	4,35
8	Transportasi dan Pergudangan	5,21	4,71	6,64	9,33	8,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,34	5,57	5,31	4,46	7,63
10	Informasi dan Komunikasi	8,57	8,03	9,74	7,99	13,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	14,07	4,14	3,57	4,31	4,22
12	Real Estate	5,94	6,08	5,43	7,70	7,19
13	Jasa Perusahaan	11,36	9,33	7,08	12,12	8,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,24	2,57	0,50	2,65	0,78
15	Jasa Pendidikan	13,91	18,41	17,55	9,53	10,17
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,61	9,74	10,33	7,12	11,20
17	Jasa lainnya	6,21	2,69	0,70	9,24	8,50
PDRB		6,10	5,30	5,34	5,14	5,42

Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah

Dari tabel diatas dilihat bahwa laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi hampir disetiap lapangan usaha. Total laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2010 sebesar 6,10 persen, pada tahun 2011 menurun sebesar 5,30 persen, pada tahun 2012 meningkat sebesar 5,34 persen, pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan sebesar 5,14 persen dan pada tahun 2014 kembali mengalami kenaikan sebesar 5,42 persen. Dan pada sektor tertentu justru mengalami kemunduran seperti pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan kehutanan pada tahun 2014 nilainya justru -2,95 persen begitu pula pada sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan pada tahun 2011 yaitu -2,19 persen. Naik turunnya laju pertumbuhan PDRB ini dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan ekonomi di wilayah jawa tengah. Hal semacam itu juga terjadi pada laju pertumbuhan PDRB di kabupaten Pemalang.

TABEL 1.3
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK Tahun 2010 Kabupaten Pemalang 2010-2014 (dalam Persen)

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,49	2,29	4,01	6,51	-1,77
2	Pertambangan dan Penggalian	10,87	4,61	5,19	5,17	6,22
3	Industri Pengolahan	2,62	7,39	8,18	6,69	13,63
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,34	7,97	6,66	5,16	0,58
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,17	6,24	1,76	5,50	7,21
6	Konstruksi	5,76	2,11	6,12	5,76	4,64
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,82	6,40	2,82	3,17	6,05
8	Transportasi dan Pergudangan	3,05	3,77	8,58	5,92	5,64

9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,50	4,09	5,77	3,35	6,63
10	Informasi dan Komunikasi	11,07	9,00	10,60	9,71	13,46
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,30	5,29	2,71	3,75	6,03
12	Real Estate	4,48	6,27	6,03	6,88	6,84
13	Jasa Perusahaan	9,06	9,46	8,50	10,84	10,41
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,61	3,62	0,93	2,14	0,16
15	Jasa Pendidikan	8,71	13,04	13,80	7,15	10,16
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,52	98,02	8,81	5,39	8,18
17	Jasa lainnya	2,85	2,72	0,38	5,51	8,68
PDRB		4,96	5,01	5,32	5,53	5,52

Sumber: BPS Kab. Pemalang

Kabupaten Pemalang yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah juga memiliki laju pertumbuhan PDRB yang fluktuasi sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2014. Fluktuasi yang terjadi di beberapa sektor ekonomi yang paling menonjol terjadi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai pada tahun 2010 sebesar 3,49 persen, pada tahun 2011 menurun sebesar 2,29 persen, pada tahun 2012 kembali meningkat sebesar 4,01 persen dan pada tahun 2013 juga kembali mengalami peningkatan sebesar 6,51 persen namun pada tahun 2014 mengalami penurunan yang sangat drastis dengan nilai laju pertumbuhan negatif yaitu sebesar -1,77 persen



Sumber: BPS Kab. Pemalang

GAMBAR 1.1
Presentase Angkatan Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2014 (dalam persen)

Berdasarkan data yang ada di badan pusat statistik Kabupaten Pemalang tingkat pengangguran sepanjang tahun 2012 – 2014 pada grafik 1.1 presentase angkatan kerja di Kabupaten Pemalang nilainya terus meningkat, pada tahun 2012 tingkat pengangguran sebesar 4,8 persen , pada tahun 2013 meningkat sebesar 6,5 persen dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 7,42 persen dengan presentasi penduduk yang bekerja pada tahun 2012 sebesar 94,86 persen, pada 2 tahun berikutnya mengalami penurunan sebesar 93,14 persen pada tahun 2013 dan 92,27 persen pada tahun 2014. Ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakstabilan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah lapangan kerja yang tersedia di Kabupaten Pemalang.

Pada tabel 1.4 dapat diketahui bahwa proporsi lapangan usaha yang ada di Kabupaten Pemalang paada tahun 2014 terkonsentrasi pada 3 sektor ekonomi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 52,75 persen, sektor industri pengolahan sebesar 16,42 persen dan sektor perdagangan sebesar 30,38 persen.

Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah ukuran untuk melihat potensi ekonomi mana yang menyerap tenaga kerja.

TABEL 1.4
Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Pemalang Tahun 2014

Sektor	Banyaknya	Presentase
Pertanian	225.057	52,75
Industri pengolahan	70.067	16,42
Perdagangan	131.524	30,38
Total	426.648	100

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa keadaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Pemalang masih fluktuasi sehingga perlu adanya suatu tindakan agar pembangunan ekonomi dapat stabil. Ketidakstabilan laju pertumbuhan PDRB dan jumlah angkatan kerja serta proporsi lapangan pekerjaan yang hanya terfokus pada 3 sektor mengakibatkan ketimpangan. Sehingga hendaknya diciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong dunia usaha diseluruh sektor yang potensial, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan semakin membuka lapangan pekerjaan sehingga akan tercapai pembangunan.

Dengan adanya hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di daerah Kabupaten Pemalang agar pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan. Penulis tertarik untuk menganalisis sektor ekonomi apa saja yang merupakan sektor ekonomi potensial di Kabupaten Pemalang sehingga dapat dikembangkan untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru serta dapat menyerap

tenaga kerja , analisis yang digunakan untuk melakukan analisis ini adalah Analisis LQ, Analisis Shift-Share, Analisis MRP, Analisis Overlay Analisis analisis kontribusi sektoral selain itu juga diperlukan adanya analisis tentang pola pertumbuhan daerah kedepan agar dapat ditetapkan suatu kebijakan terhadap perkembangan ekonomi yang ada di Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dengan menggunakan Analisis Klassen Typology dan analisis SWOT untuk menentukan kebijakan yang akan diterapkan. Untuk itu penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“ANALISIS EKONOMI UNGGULAN UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010-2014”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Mengingat ruang lingkup pembangunan yang sangat luas, pada penelitian ini dibatasi pada sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Pemalang sebagai indikator pembangunan yang dilihat dari nilai PDRB menurut lapangan usaha atas harga konstan 2010 yang ada di Kabupaten Pemalang dengan mengambil data tahunan dari tahun 2010-2014.

C. Rumusan Masalah penelitian

Berdasarkan latar belakang dan batasan penelitian yang telah dipaparkan penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sektor ekonomi apakah yang menjadi sektor ekonomi basis di Kabupaten Pemalang, serta sektor ekonomi apa yang memiliki keunggulan kompetitif atau daya saing dengan wilayah provinsi dan sektor apa saja yang

pertumbuhannya cepat dengan menggunakan analisis Analisis *LQ*, *Shift-Share*, *MRP* dan *overlay* ?

2. Bagaimana pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Pematang dengan analisis kontribusi sektoral?
3. Bagaimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten pematang dengan menggunakan analisis *Klassen Typology*?
4. Apa kebijakan yang seharusnya diterapkan di kabupaten pematang berdasarkan analisis SWOT?

D. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah serta hal-hal yang dilakukan selama penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui sektor ekonomi yang menjadi sektor ekonomi basis di Kabupaten Pematang, serta sektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif atau daya saing dengan wilayah provinsi dan mengetahui sektor pertumbuhannya cepat dengan menggunakan analisis Analisis *LQ*, *Shift-Share*, *MRP*, dan analisis *Overlay*
2. Mengetahui pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Pematang dengan analisis kontribusi sektoral.
3. Mengetahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten pematang dengan menggunakan *Klassen Typology*.
4. Mengetahui kebijakan yang dapat diterapkan di Kabupaten pematang sesuai analisis SWOT.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi beberapa pihak yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan disetiap daerah sehingga dapat menerapkan analisis yang di ajarkan selama dunia perkuliahan dan dapat membandingkan antara teori yang diterima dengan keadaan pada saat praktek di lapangan.

2. Bagi Mahasiswa

Menambah referensi tentang pembangunan ekonomi disuatu daerah untuk digunakan sebagai pertimbangan studi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi bagaimana pembangunan ekonomi di Kabupaten Pematang Siantar.

4. Bagi Pemerintah

Memudahkan pemerintah Kabupaten Pematang Siantar dalam mengambil kebijakan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan potensi ekonomi unggulan dan tipologi yang dimiliki. Serta memberikan informasi untuk pemerintah Kabupaten Pematang Siantar sebagai pertimbangan terhadap kinerja ekonomi di masing-masing sektor ekonomi.